

Gender analysis in empowering women-headed family in Mojosongo Village, Surakarta

Irma Maulidatul Husna*, Rina Herlina Haryanti**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Email: irmaulida@student.uns.ac.id

**Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Email: rinaherlinaharyanti@staff.uns.ac.id

*Corresponding author, email: irmaulida@student.uns.ac.id

Received: July 13, 2021 Accepted: September 1, 2021 Published: September 30, 2021

ABSTRACT

This paper discusses the achievement for the level of equality in the women-headed family empowerment program in Mojosongo Village, Surakarta City. A woman is one of the population groups that are sustainable to poverty. Women experiencing poverty are women who become the head of the family. In Surakarta City, there are 11.502 women-headed families with a low welfare level. To resolve this problem, the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (PPPAPM) of Surakarta made an innovation program by forming the Pekka (Women-Headed Family Empowerment) Forum in five poverty-stricken villages, one of which is Mojosongo. Mojosongo is a village that has the highest number of women-headed families, namely 727 people from five poverty-stricken villages. This study used gender analysis of the Longwe model to see the level of equality on women-headed family empowerment in Mojosongo, Surakarta City. The method used in this study was qualitative descriptive, and the data collection was obtained by observations, interviews, and documentation. The results of the study show that the level of equality in the women-headed family in Mojosongo only reached the second stage, namely access. Meanwhile, in the stages of awareness, participation and control have not been achieved. There are two implications of this study, namely practical and theoretical implications. For practical implications, the Surakarta City Government can use it as recommendations for empowerment programs, especially the women-headed family empowerment. The theoretical implications are expected to add to the research literature on gender analysis of the Longwe model in women's empowerment.

Keywords: Empowerment; gender; women-headed family.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas ketercapaian tingkat kesetaraan pada program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Perempuan yang banyak mengalami kemiskinan ialah perempuan yang menjadi kepala keluarga. Di Kota Surakarta ini terdapat 11.502 perempuan kepala keluarga yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Surakarta membuat program inovasi yaitu membentuk Forum Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) di lima kelurahan kantong kemiskinan salah satunya Kelurahan Mojosongo. Kelurahan Mojosongo merupakan kelurahan yang memiliki jumlah perempuan kepala keluarga terbanyak yaitu 727 orang dari lima kelurahan kantong kemiskinan. Tulisan ini menggunakan analisis gender model Longwe untuk melihat sampai pada tingkat apa kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data diambil dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo secara keseluruhan hanya sampai pada tingkat kedua yaitu akses. Sedangkan pada tingkat kesadaran, partisipasi, dan kontrol belum tercapai. Implikasi penelitian ini ada dua yaitu implikasi praktis dan teoritis. Untuk implikasi praktis dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai bahan masukan mengenai program pemberdayaan khususnya pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Adapun implikasi teoritisnya diharapkan dapat menambah literatur riset mengenai analisis gender Longwe dalam pemberdayaan perempuan.

Kata Kunci: Gender; pemberdayaan; perempuan kepala keluarga.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan masih dialami oleh Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa. Seperti pernyataan berikut ini bahwa seluruh negara dapat mengalami dan menghadapi permasalahan berupa kemiskinan, tidak terkecuali di negara berkembang seperti Indonesia (Aziz et al, 2016). Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,78% (BPS, 2020). Dibedakan menurut jenis kelamin dan usia penduduk, diperoleh nilai *Head Count Index* penduduk perempuan pada Maret 2020 sebesar 9,96% (BPS, 2020). Artinya, terdapat 9,96 persen penduduk perempuan yang berstatus miskin.

Perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Menurut UNDP dalam Fitri dan Vonda (2016) kemiskinan dan perempuan semakin dilihat sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan internasional, salah

satu alasannya adalah karena banyak orang termiskin di dunia yaitu dari kalangan wanita. Kemiskinan yang dialami perempuan menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Terdapat keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang berakar dari budaya patriarki turut menjadikan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan.

Perempuan yang banyak mengalami kemiskinan ialah perempuan yang menjadi kepala keluarga. Hal ini dibuktikan dengan data presentase perempuan kepala keluarga di Indonesia yang miskin yaitu mencapai 15,88% (BPS, 2020). Perempuan sebagai kepala keluarga memiliki resiko bertambahnya beban kegiatan yang ditanggungnya di sektor publik dan domestik. Perempuan yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal antara lain: karena perceraian, suami merantau, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia (Putri, Darwis, & Basar, 2015). Sejak ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perempuan bisa disebut sebagai kepala keluarga secara legal formal. Perempuan bisa memperoleh kartu keluarga sendiri tanpa harus bergabung dengan orang tua atau mantan suami sehingga bisa mengakses pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Namun kenyataannya secara kultural perempuan kepala keluarga masih tidak dianggap di masyarakat.

Masyarakat masih menganggap sebuah keluarga lazimnya dikepalai oleh seorang laki-laki. Peran gender yang melekat secara otomatis pada seorang laki-laki ialah sebagai kepala keluarga dan sebaliknya perempuan melekat peran gendernya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan kepala keluarga masih mengalami diskriminasi oleh lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ernawati (2013) bahwa istri ibu rumah tangga dan laki-laki adalah kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah, menjadi sesuatu yang dianggap *taken for granted*, alamiah, dan bukan konstruksi sosial yang setiap saat bisa berubah. Karena itu ketidakadilan gender bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat. Ketidakadilan gender dipengaruhi oleh adanya bermacam penafsiran tentang makna gender itu sendiri. Seringkali gender disamakan dengan *sex* (jenis kelamin), dan pembagian peran serta tanggung jawabnya masing-masing telah dibuat dan berlaku dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, bahkan peran gender oleh masyarakat kemudian diyakini seolah-olah merupakan kodrat yang diberikan Tuhan (Mutmainnah, 2019). Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan kepala keluarga.

Upaya yang dapat ditempuh salah satunya yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga agar lebih dapat memandirikan dirinya sendiri untuk menghidupi keluarganya dan dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Karena program pemberdayaan merupakan sebuah cara pembangunan yang bersifat kerakyatan yang merupakan upaya untuk meningkatkan derajat sebagian masyarakat yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan (Noor, 2011). Adapun penjelasan lain mengenai pemberdayaan masyarakat yaitu yang dinyatakan oleh Chamber (1995) dalam Noor (2011) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah ide pembangunan ekonomi yang

menjunjung nilai-nilai masyarakat dalam pembangunan yang bersifat *empowerment, people-centered, participatory, and sustainable*.

Menurut BPS, di Jawa Tengah presentase kepala keluarga perempuan sebanyak 16,84% pada tahun 2019. Kemiskinan di Jawa Tengah sedikit dipengaruhi oleh perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga dan jika dipersentasekan hingga mencapai angka 40% (jatengprov.or.id, 2019). Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi yang terjadi pada perempuan dalam isu gender, salah satunya dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Untuk mendukung kebijakan pengarusutamaan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Surakarta membuat inovasi program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Program pemberdayaan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di Kota Surakarta ini terdapat 11.502 perempuan kepala keluarga yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Dalam program pemberdayaan perempuan kepala keluarga dibentuk sebuah forum di setiap kelurahan yang disebut dengan Forum Pekka (Perempuan Kepala Keluarga). Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan taraf intelektual para perempuan kepala keluarga di Surakarta agar dapat lebih terlibat dalam pembangunan. Forum Pekka ini sudah berdiri di 5 (lima) kelurahan kantong kemiskinan yang dijuluki dengan Mojang Sekati yaitu Kelurahan Mojosongo, Pajang, Semanggi, Kadipiro, dan Tipes.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis keberhasilan dari program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo. Karena kelurahan ini memiliki perempuan kepala keluarga miskin terbanyak dari kelima kelurahan yang merupakan kantong kemiskinan yaitu sebanyak 727 orang. Jika dibandingkan dengan kelima kelurahan lainnya seperti Kelurahan Tipes yang memiliki 279 orang, Kelurahan Kadipiro 188 orang, Kelurahan Semanggi 652 orang, dan Kelurahan Pajang 501 orang, maka Kelurahan Mojosongo memiliki jumlah perempuan kepala keluarga terbanyak (BPS Kota Surakarta, 2018). Pentingnya pemberdayaan bagi perempuan kepala keluarga ini agar dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional. Melalui pemberdayaan, perempuan kepala keluarga dapat meningkatkan kesadarannya serta dapat memampukan kehidupan diri dan keluarganya.

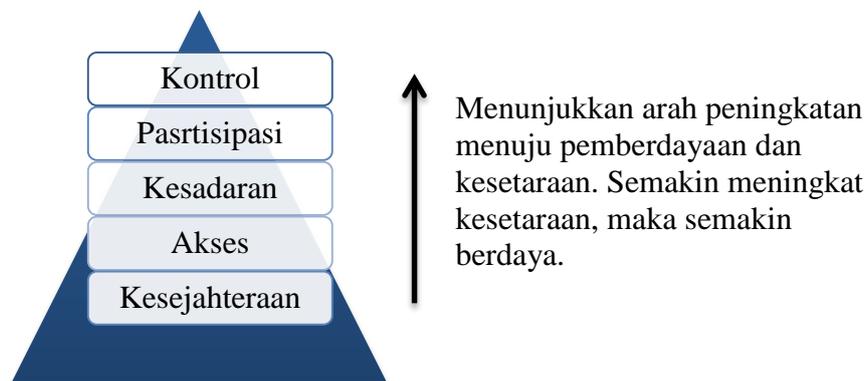
2. KAJIAN LITERATUR

Untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait pemberdayaan perempuan yang juga dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Pada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Susanti (2013) yang menilai tingkat keberdayaan perempuan kepala keluarga dalam program PEKKA di Desa Dayah Tanoh, Kabupaten Pidie, Aceh

menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol perempuan kepala keluarga. Namun untuk perempuan kepala keluarga yang berusia lanjut belum sepenuhnya berdaya dengan tercapainya tingkat keberdayaan kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol karena mereka mengikuti program pemberdayaan hanya untuk mengisi waktu luang, berkumpul bersama, dan memperoleh informasi. Ada relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tingkat keberdayaan atau tingkat kesetaraan perempuan kepala keluarga dalam program pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

Penelitian lain oleh Mutiara (2017) yang menganalisis keberhasilan program pemberdayaan perempuan pada para Buruh Gendong di Pasar Beringharjo dilihat dari teori gender Longwe. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah sampai pada tingkat partisipasi. Sedangkan dalam aspek kontrol masih dikatakan rendah karena daya tawar mereka terhadap upah yang lebih baik juga masih sulit terwujud. Dengan kata lain, para Buruh Gendong di Pasar Beringharjo belum mampu mengontrol daya tawar upah mereka agar lebih baik. Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis tingkat kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan dengan menggunakan teori gender Longwe.

Analisis gender Longwe ini diperkenalkan oleh Sara Hlupekile Longwe yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan. Tingkat kesetaraan dalam analisis gender Longwe ini memiliki 5 tingkat kesetaraan yang dapat digunakan untuk menilai kemungkinan intervensi perempuan dalam pembangunan. Berikut adalah konsep lima tingkat kesetaraan:



Gambar 1. Piramida Konsep Kesetaraan Gender Sara Longwe. Sumber: March, et al (1999: 94).

March, et al (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesetaraan ini bersifat hierarkis. Jika intervensi hanya berkonsentrasi pada kesejahteraan maka tidak mungkin tercapai pemberdayaan perempuan. Tingkat kesetaraan dalam analisis gender Longwe didefinisikan lebih detail sebagai berikut:

a. Kesejahteraan

Longwe mendefinisikan ini sebagai tingkat kesejahteraan materi pada perempuan. Apakah perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap

sumber daya seperti kebutuhan primer, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap perawatan kesehatan. Tetapi jika intervensi terbatas pada tingkat kesejahteraan ini, maka disini berbicara tentang perempuan yang diberi manfaat ini, daripada memproduksi atau mendapatkan manfaat seperti itu untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ini adalah tingkat pemberdayaan nol, di mana perempuan adalah penerima manfaat pasif yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi.

b. Akses

Akses ini didefinisikan sebagai kesamaan akses perempuan dan laki-laki ke fasilitas pemasaran, kredit/pinjaman modal, semua layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Longwe menunjukkan kesetaraan akses itu diperoleh dengan menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan, yang biasanya memerlukan reformasi hukum dan praktik administrasi untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

c. Kesadaran

Dalam analisis gender Longwe aspek ini dipahami sebagai suatu kesadaran pemahaman tentang gender dan peran perempuan dalam pembangunan. Kesadaran juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan menyenangkan untuk kedua belah pihak, dan tidak melibatkan dominasi ekonomi atau politik dari satu jenis kelamin. Ini melibatkan kesadaran bahwa relatif kurangnya akses perempuan ke sumber daya sebenarnya muncul dari praktik dan aturan diskriminatif yang memberikan prioritas akses dan kontrol kepada laki-laki. Oleh karena itu, penyadaran terkait dengan dorongan kolektif untuk bertindak untuk menghapus satu atau lebih praktik diskriminatif yang menghambat akses perempuan ke sumber daya. Keyakinan pada kesetaraan seksual adalah dasar dari kesadaran gender, dan dari partisipasi kolektif dalam proses pemberdayaan perempuan.

d. Partisipasi

Longwe mendefinisikan ini sebagai partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan, dalam pembuatan kebijakan, administrasi, dan perencanaan. Partisipasi merupakan tingkat tindakan yang melengkapi kesadaran. Itu adalah aspek yang sangat penting dari sebuah proyek pembangunan, dimana partisipasi dimaknai dengan keterlibatan dalam penilaian kebutuhan, perumusan proyek, implementasi, dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam membuat keputusan dimana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang cocok dengan proporsi mereka di komunitas yang lebih luas.

e. Kontrol

Istilah ini menunjukkan kontrol perempuan atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran, untuk mencapai kesetaraan kendali atas distribusi manfaat dan faktor-faktor produksi. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara pria dan

wanita, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi. Mereka telah mengambil apa yang menjadi milik mereka, dan tidak lagi menunggu tanpa batas untuk diberikan sumber daya semata-mata atas kebijakan manusia, atau atas kehendak otoritas patriarkal.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al, 2020). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan yang digunakan sebagai sumber data dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih diantaranya adalah Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas P3APM Kota Surakarta yang selanjutnya akan disebut dalam pembahasan sebagai DP3APM1 dan tiga perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo yang selanjutnya akan disebut sebagai Ibu SH, Ibu SJ, dan Ibu SM. Sumber data dokumentasi berasal dari Laporan Laboratorium Kepemimpinan Diklat Pim IV Angkatan XVI Tahun 2018 pembentukan forum pekka milik Kepala Seksi PUG dan Perlindungan Perempuan DP3APM Kota Surakarta, foto-foto kegiatan pemberdayaan, dan Laporan Aksi Perubahan Pada DP3APM Kota Surakarta Tahun 2020. Validitas data yang digunakan yaitu dengan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif milik Miles dan Huberman serta analisis gender Sara H. Longwe.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

Penelitian ini menjabarkan analisis tingkat kesetaraan yang mengacu pada teori gender Longwe. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke analisis gender Longwe, penulis ingin mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dilakukan oleh DP3APM Kota Surakarta. Pembentukan Forum Pekka dimaksudkan sebagai wadah partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga diharapkan perempuan kepala keluarga khususnya mereka yang rentan dapat mempunyai kekuatan dan kemampuan yang baik dalam hal mental maupun kemampuan untuk meningkatkan ekonomi. Forum Pekka dibentuk satu kelurahan yang terdiri dari 10 orang sehingga terdapat 50 perempuan kepala keluarga di Forum Pekka Kota Surakarta. Setelah terbentuk Forum Pekka di Kota Surakarta, DP3APM mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi untuk penguatan ketahanan keluarga.

Untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Forum Pekka, ada beberapa program/kegiatan yang dilakukan oleh DP3APM Kota Surakarta dalam rangka pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Pelatihan *Soft Skill* dan *Hard Skill*

Setelah dibentuknya Forum Pekka di lima kelurahan Mojang Sekati, para perempuan kepala keluarga mengikuti kegiatan pelatihan *soft skill* dan penguatan mental dengan dipaparkan materi tentang ketahanan keluarga. Kemudian juga

para perempuan kepala keluarga mengikuti pelatihan *hard skill* mengenai pengemasan dan pemasaran produk yang efektif.

b. Pelatihan Keterampilan

Setelah dibentuknya forum ini, para perempuan kepala keluarga di Mojosongo mengikuti beberapa pelatihan keterampilan seperti pembuatan sabun cuci, sabun mandi, membuat sandal dan keset. Selanjutnya pada tahun 2020, karena akibat dari pandemi Covid-19, DP3APM Kota Surakarta membuat kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi untuk perempuan kepala keluarga dengan membuat masker dan *face shield* yang kemudian akan didistribusikan ke rumah sakit di Kota Surakarta. Dari kegiatan pembuatan masker dan *face shield* tersebut, perempuan kepala keluarga di Mojosongo mendapatkan upah per bijinya. Kemudian di awal tahun 2021 dilakukan pelatihan kembali yaitu pelatihan merajut. Pelatihan keterampilan yang diikuti tidak semuanya sama, karena ada beberapa perempuan kepala keluarga yang berhalangan hadir ketika DP3APM Kota Surakarta mengadakan pelatihan keterampilan.

c. Pertemuan Rutin Forum di Tingkat Kelurahan

Pertemuan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali untuk mengevaluasi dan memonitoring perkembangan pelatihan yang telah didapatkan, dan juga membahas permasalahan yang dihadapi dengan dampingan kelurahan. Dalam wawancara penulis terhadap para perempuan kepala keluarga di Mojosongo, peran kelurahan tidak terlihat dalam perkembangan Forum Pekka. Informan perempuan kepala keluarga di Mojosongo menyatakan bahwa tidak ada pendampingan dari tingkat kelurahan. Mereka melakukan pertemuan rutin hanya dengan anggota yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali sebelum pandemi dan hanya 3 kali saat pandemi tahun 2020. Pertemuan rutin tersebut membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dari tiap anggota, membahas tentang penjualan sabun cuci piring, membahas keuangan forum, dan membahas tentang usaha lain yang akan dilakukan bersama.

d. Pertemuan Rutin Forum di Tingkat Kota

Pertemuan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan mengumpulkan Forum Pekka dari lima kelurahan. Pertemuan diadakan di Dinas P3APM Kota Surakarta dan membahas mengenai permasalahan serta kendala-kendala di forum tingkat kelurahan. Pertemuan rutin tersebut hanya dihadiri ketua sebagai perwakilan dari setiap Forum Pekka di Kota Surakarta.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat sejauh mana tingkat kesetaraan perempuan kepala keluarga dan apakah telah mencapai pemberdayaan. Tingkat kesetaraan yang dimaksud dalam teori gender Longwe ialah terdiri dari lima tingkat kesetaraan yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Tingkat kesetaraan ini dapat digunakan untuk menilai kemungkinan intervensi

perempuan dalam suatu pembangunan. Jika tingkat kesetaraan sudah mencapai pada tingkat kontrol maka perempuan telah berdaya. Dengan demikian, lima tingkat kesetaraan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo yang secara lebih terperinci dikaji sebagai berikut:

4.1. Kesejahteraan

Sara H. Longwe mendefinisikan tingkat kesejahteraan ini dilihat dari akses perempuan terhadap kebutuhan primer, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap perawatan kesehatan (March et al, 1999). Dalam temuan penelitian ini dari aspek peningkatan pendapatan, terdapat sedikit perubahan dari para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo yang tadinya hanya mendapatkan uang dari pekerjaan utama mereka, kini mereka mendapatkan tambahan uang dari penjualan usaha kecilnya. Usaha kecilnya yaitu menjual produk sabun cuci piring hasil pembuatan sendiri dan kerupuk karak beras merah tanpa pengawet. Mereka melakukan usaha kecil tersebut dengan modal dari uang kas Forum Pekka Mojosongo. Berkat usaha-usaha tersebut mereka mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp.100.000 per minggu. Ide usaha penjualan produk sabun cuci piring muncul berkat pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang dilakukan oleh DP3APM Kota Surakarta untuk para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo. Setelah pelatihan tersebut, Ibu SH selaku ketua Forum Pekka di Kelurahan Mojosongo mengajak anggotanya untuk mengumpulkan modal dan berwirausaha bersama. Pembuatan sabun cuci piring dipilih karena dalam membuatnya tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak.

Selanjutnya dari aspek kebutuhan primer, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka mampu memenuhinya dari hasil pendapatan utama mereka dan ada yang menggunakan hasil pendapatan dari usaha Forum Pekka. Dari aspek perawatan kesehatan, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan perawatan kesehatan ketika mereka sakit bahkan dua diantara tiga perempuan kepala keluarga yang diwawancarai mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan demikian, berdasarkan tiga aspek yang telah disebutkan yaitu aspek peningkatan pendapatan, kebutuhan primer, dan perawatan kesehatan, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo telah mencapai tingkat kesejahteraan.

4.2. Akses

Ketercapaian aspek akses ini dapat dilihat dari adanya akses terhadap fasilitas pemasaran, kredit/pinjaman modal, dan akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (March et al, 1999). Pada aspek ini penulis membahas akses yang dimiliki para anggota Forum Pekka terhadap sumber daya, peningkatan produktivitas serta bagaimana Forum Pekka mampu menjadi sarana bagi para anggotanya untuk memperoleh akses dan fasilitas publik. *Pertama*, para perempuan kepala keluarga di

Kelurahan Mojosongo mendapatkan fasilitas pemasaran berupa pembukaan bazar di Balaikota dan DP3APM Kota Surakarta memberikan fasilitas pemasaran lainnya yaitu dengan memasarkan produk mereka di lingkungan dinas Kota Surakarta. Kegiatan bazar yang diadakan oleh DP3APM Kota Surakarta ada dua yaitu Bazar Hari Kartini dan Bazar Hari Ibu. Kedua bazar tersebut diselenggarakan pada tahun 2019.

Kedua, akses lain yang didapatkan para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo ialah dengan adanya kegiatan berupa Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) yang memiliki dua tahap. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi pada era pandemi di tahun 2020. Kegiatan JPE ini termasuk dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk Forum Perempuan Berdaya Surakarta. Forum tersebut merupakan gabungan dari berbagai forum perempuan di Kota Surakarta seperti Forum Pekka, perempuan penyandang disabilitas, purna pekerja migran Indonesia, kader dan anggota PKK. Pada bulan Mei 2020 JPE Tahap I yaitu pembuatan masker, dan bulan Agustus 2020 yaitu pelaksanaan JPE Tahap II dengan pembuatan *face shield*. Dari adanya kegiatan tersebut, Forum Pekka Kelurahan Mojosongo mendapatkan upah sekitar Rp.4000.000 yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggotanya dan sisanya disimpan untuk kas forum.

Ketiga, pada hal akses terhadap kredit/pinjaman modal, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo tidak meminjam modal ke manapun. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak berani mengambil resiko, mereka merasa usaha yang mereka kembangkan masih kecil-kecilan dan takut tidak bisa mengembalikan dana modal yang dipinjamkan kepada mereka. *Keempat*, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo dalam mendapatkan akses layanan publik seperti pendidikan anak dan kesehatan tidak mengalami kesulitan dan tidak ada perubahan apapun setelah mengikuti Forum Pekka. Akses layanan pendidikan seperti pendidikan dan kesehatan yang mereka dapat ini tidak dipengaruhi oleh keikutsertaannya sebagai anggota Forum Pekka di Kelurahan Mojosongo.

Dengan demikian, dari berbagai uraian di atas dapat diketahui bahwa melalui Forum Pekka, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo dapat memperoleh akses seperti fasilitas pemasaran dan peningkatan produktivitas dengan bergabungnya ke dalam Forum Perempuan Berdaya Surakarta. Sedangkan akses pinjaman modal tidak didapatkan oleh mereka karena terlalu beresiko bagi usaha yang masih kecil. Akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan telah mereka dapatkan sebelum mengikuti Forum Pekka.

4.3. Kesadaran

Sara H. Longwe mengungkapkan tingkat kesadaran ini dapat dilihat dari adanya pemahaman tentang gender dan peran perempuan dalam pembangunan (March et al, 1999). Berdasarkan temuan pada penelitian ini, para perempuan kepala keluarga belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang gender dan peran perempuan dalam pembangunan.

Kesadaran yang baru muncul dari perempuan yang tergabung dalam Forum Pekka Mojosoongo yakni perempuan kepala keluarga tetap dapat memiliki kemandirian dan mental yang tangguh meski sudah tidak ada suami. Mereka sadar dan memahami bahwa mereka harus bisa mandiri dan tangguh mentalnya karena mereka hidup sendiri dengan anak-anaknya. Kesadaran tersebut telah muncul semenjak mereka menjadi perempuan kepala keluarga. Mereka menjadi lebih yakin dan percaya diri bahwa mereka dapat hidup selayaknya perempuan lain bahkan bisa lebih mandiri.

Para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo belum memahami dan belum menyadari sepenuhnya bahwa mereka juga bisa berperan dalam pembangunan. Namun mereka hanya menyadari posisi mereka sebagai perempuan kepala keluarga yang harus mandiri karena sudah tidak ada lagi laki-laki yang mendampingi mereka. Dengan demikian, belum ada kesadaran perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo mengenai gender dan peran perempuan dalam pembangunan.

4.4. Partisipasi

Aspek partisipasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi (March et al, 1999). Berdasarkan temuan pada penelitian ini, partisipasi perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo dapat dilihat melalui rapat anggota Forum Pekka dan keterlibatannya dalam proses evaluasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

Partisipasi perempuan kepala keluarga dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Dinas P3APM Kota Surakarta hanya ketua forum yang dilibatkan sebagai perwakilan perempuan kepala keluarga dari tiap kelurahan. Meskipun demikian, para anggota Forum Pekka di Kelurahan Mojosoongo tetap dapat menyalurkan pendapat, kritik, dan sarannya melalui rapat anggota yang dilakukan setiap dua bulan sekali di tingkat kelurahan. Rapat tersebut biasanya diselenggarakan di tiap rumah anggota secara bergantian. Perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo dapat terlibat dalam memberikan pendapat, kritik maupun saran dalam sebuah forum. Pendapat yang mereka sampaikan hanya seputar pelaksanaan pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dilakukan oleh DP3APM Kota Surakarta.

Selanjutnya dalam penetapan kebutuhan atau pembuatan kebijakan, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo belum ikut terlibat. Mereka tidak terlibat dalam pembuatan keputusan di tingkat yang lebih tinggi baik dalam penetapan kebutuhan maupun dalam formulasi program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dan formulasi kebijakan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pada tingkat partisipasi ini belum sepenuhnya tercapai karena keterlibatan para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo hanya pada konteks tertentu yang tidak jauh dari program pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

4.5. Kontrol

Sara H. Longwe mendefinisikan tingkat kontrol sebagai tingkat paling tinggi dimana perempuan memiliki kendali atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan partisipasi, hal ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi (March et al, 1999).

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, kontrol dalam pengambilan keputusan dari para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo dilihat dari kemampuannya mengambil keputusan pada ranah Forum Pekka. *Pertama*, kontrol dalam hal mengambil keputusan untuk menyuarakan pendapat dalam Forum Pekka tingkat kelurahan maupun dalam Forum Pekka tingkat kota. Namun dalam forum tingkat kota hanya ketua sebagai perwakilan dan mampu menyampaikan pendapatnya dalam evaluasi yang dilakukan oleh DP3APM Kota Surakarta sebagai pihak pemberdayaan.

Kedua, kontrol perempuan kepala keluarga atas pengambilan keputusan dalam menentukan usaha apa yang akan dikembangkan setelah mengikuti pelatihan keterampilan. Seperti yang telah diketahui bahwa para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo mengembangkan usaha sabun cuci piring dan kerupuk karak beras merah. Keputusan untuk berwirausaha tersebut ditentukan bersama-sama anggota Forum Pekka Kelurahan Mojosongo.

Ketiga, kontrol perempuan kepala keluarga dalam mengambil keputusan di ranah rumah tangga. Mereka menjadi satu-satunya yang bisa mengambil keputusan untuk keluarganya. Namun para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo dalam mengambil keputusan dalam keluarganya masih ada campur tangan dari pihak lain baik itu orang tua maupun saudara. Berdasarkan uraian penjelasan ketiga hal mengenai kontrol para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa mereka mampu mengambil keputusan untuk mengemukakan pendapat dan kritiknya terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan, serta memutuskan pengembangan usaha apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo belum sampai pada tingkat kontrol. Mereka hanya mampu memiliki kontrol terhadap konteks tertentu yang satu linier dengan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

5. SIMPULAN

Program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo yang dilakukan melalui pembentukan Forum Pekka belum sampai pada tingkat paling tinggi yaitu kontrol tetapi masih pada tingkat akses dilihat dari analisis gender Longwe dengan lima tingkat kesetaraan. Pada aspek kesejahteraan, para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo telah mencapai kesejahteraan karena dapat

menghasilkan pendapatan tambahan meskipun hanya sedikit dan bisa mencukupi kebutuhan primer serta perawatan kesehatan yang memadai. Pada tingkat akses, mereka mendapatkan akses pemasaran dari DP3APM dan juga lingkungan mereka. Selain itu layanan publik berupa pendidikan dan kesehatan pun sudah mereka dapatkan bahkan sebelum ikut dalam Forum Pekka. Sedangkan akses pinjaman modal belum mereka dapatkan karena menurut mereka terlalu beresiko untuk usaha yang masih kecil. Meskipun begitu, mereka tetap dikatakan telah sampai pada tingkat akses ini karena mereka telah mendapatkan akses pemasaran dan layanan publik yang lebih menunjang kehidupan.

Pada aspek kesadaran menurut Sara H. Longwe dapat tercapai jika para perempuan telah memiliki pemahaman tentang gender dan peran perempuan dalam pembangunan. Sedangkan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo belum memiliki pemahaman mengenai dua hal itu. Selanjutnya aspek partisipasi dapat tercapai jika para perempuan mampu terlibat aktif dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosoongo hanya mampu terlibat dalam evaluasi dimana mereka memberikan pendapat dan saran kepada DP3APM Kota Surakarta. Pada aspek kontrol juga belum tercapai, dilihat dari belum mampunya mereka dalam mengambil keputusan pada ranah yang lebih luas.

Referensi

- Aziz, G.A., Eny R., Warsilan. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(1), 29-48. doi: <http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.7988>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil perempuan Indonesia 2019*. Desember. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2019*. Januari. BPS RI. Jakarta.
- Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (2017). *Jumlah kepala keluarga per Kecamatan Surakarta semester 1 tahun 2017*. Surakarta.
- Ernawati. (2013). Menyibak perempuan kepala keluarga. *Jurnal Muwazah*, 5(2), 154-162. Diambil dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/343>
- Fitri, Cut Dian. P. I. Vonda. (2016). How The Commitment to Achieve Sustainable Development Goals Impacts Poor Women in Aceh Province, Indonesia. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(2), 51-58. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v2i2.1465>
- Fujiani, E. Dede, Y. Darusman, L. Oktiawanti. (2019). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (pekka) melalui pelatihan berwirausaha (Studi pada kelompok Zahra Prima di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya).

Indonesian Journal of Adult and Community Education, 1(1), 20-25. Diambil dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/20002>

Hardani., Helmina A., Jumari., Evi F.U., Ria R. I., Roushandy A. F., Dhika J. S., Nur H.A. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Humas Jateng. Genjot penurunan kemiskinan, Jateng bidik pemberdayaan perempuan kepala keluarga. (2019, Februari 11). Diambil dari <https://jatengprov.go.id/publik/genjot-penurunan-kemiskinan-jateng-bidik-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/>

March, C., I. Smyth, dan M. Mukhopadhyay. (1999). *A Guide to Gender Analysis Frameworks*. Oxford: Oxfam GB.

Mutmainnah. (2019). Kesenjangan Gender Ditinjau dari Perspektif Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1),1-8. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5374>

Noor, Munawar. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*,1(2), 87-99. <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>

Putri, O.N, Rudi S.D & Gigin G.K.B. (2015). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga. *Prosiding KS: Riset & PKM Unpad*, Bandung. Diambil dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13538>

Rawung, Selfi. (2020). *Laporan aksi perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta*. Surakarta, Indonesia: Dinas PP, PA, dan PM Kota Surakarta.

Setyowati, Tri. (2018). *Laboratorium kepemimpinan Diklat Pim IV Angkatan XVI tahun 2018*. Surakarta, Indonesia: Dinas PP, PA, dan PM Kota Surakarta.

Susanti, Elly. (2013). Tingkat keberdayaan perempuan kepala keluarga (Kasus pada Program PEKKA di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Agrisepe*, 14(2),44-53. Diambil dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisepe/article/view/2374>